

Efektivitas Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara Dalam Mendukung Kinerja Pengawasan Internal : Studi Deskriptif Kualitatif Berbasis Dokumen

Ahmad Ramadhani^{*1}, Romy Suryaningrat Edwin Tamburaka², La Ode Muhamad Nurrahmad Arsyad³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Rekayasa, Program Pascasarjana, Universitas Halu Oleo, Indonesia

^{2,3}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: ¹dh444ni74@gmail.com, ²romyedwin72@gmail.com, ³arsyadjr@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis analisis dokumen terhadap dokumen perencanaan pembangunan, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP), serta data evaluasi internal kelembagaan. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian dokumen menunjukkan adanya peningkatan keterpenuhan sarana kerja, optimalisasi tata ruang pengawasan, serta perbaikan capaian indikator kinerja tertentu seperti ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan dan intensitas koordinasi internal. Pembangunan gedung dinilai mendukung penguatan fungsi kelembagaan pengawasan daerah. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya dukungan infrastruktur fisik sebagai faktor pendukung kinerja organisasi pengawasan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Efektivitas, Inspektorat, Kinerja APIP, Pembangunan Gedung, Tata Kelola Pemerintahan.*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the construction of the North Kolaka Regency Inspectorate Office Building in supporting the performance of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The study uses a qualitative descriptive approach based on document analysis of development planning documents, activity implementation reports, government agency performance reports (LKjIP), and internal institutional evaluation data. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the document review indicate an increase in the fulfillment of work facilities, optimization of the supervisory layout, and improvements in the achievement of certain performance indicators such as the timeliness of completion of supervisory reports and the intensity of internal coordination. The construction of the building is considered to support the strengthening of the institutional function of regional supervision. Scientifically, this study provides a conceptual contribution regarding the importance of physical infrastructure support as a supporting factor for the performance of regional government supervisory organizations.

Keywords: *Effectiveness, Inspectorate, APIP Performance, Building Construction, Governance.*

1. PENDAHULUAN

Inspektorat daerah memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Gazali, 2024; Lii et al., 2025). Kinerja APIP dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai (Ekowati & Akbar, 2023). Pembangunan gedung kantor yang representatif dan sesuai standar kerja merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal (Gumilang et al., 2025).

Dalam menjalankan fungsinya, inspektorat daerah menjaga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan (Dewi, 2022). Kualitas hasil pengawasan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia serta dukungan sarana prasarana (Fujilestari et al., 2025). Lingkungan kerja yang nyaman, tata ruang yang fungsional, serta fasilitas teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek manajerial, kapasitas SDM, sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi dalam menjelaskan kinerja APIP (Dewi, 2022; Fujilestari et al., 2025; Gazali, 2024). Kajian mengenai infrastruktur perkantoran umumnya ditempatkan sebagai faktor pendukung administratif (Jauhari & Sukmara, 2024; Setiawan, 2024). Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya evaluasi efektivitas pembangunan gedung lembaga pengawasan yang dianalisis secara sistematis berbasis dokumen perencanaan daerah dan laporan kinerja resmi. Padahal, analisis berbasis dokumen dapat memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara pembangunan fisik dan capaian indikator kinerja organisasi.

Gedung kantor yang memadai memang berfungsi sebagai sarana vital dalam mendukung efektivitas kerja APIP karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan koordinasi antarunit, serta mempercepat proses pengambilan keputusan (Jauhari & Sukmara, 2024). Selain itu, fasilitas yang baik mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip *good governance* (Ariwibowo et al., 2024). Namun demikian, argumentasi tersebut masih dominan bersifat normatif dan belum sepenuhnya diuji melalui analisis terhadap dokumen kinerja dan perencanaan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur perkantoran lembaga pengawasan juga dipandang sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas aparatur (Ragi et al., 2024). Gedung yang dirancang sesuai kebutuhan operasional diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang produktif dan kolaboratif serta memperkuat profesionalitas lembaga. Peningkatan kualitas sarana fisik ini diasumsikan berkontribusi terhadap kinerja organisasi (Rahma et al., 2023). Namun asumsi tersebut memerlukan pembuktian berbasis data empiris agar tidak berhenti pada justifikasi administratif semata.

Dalam konteks Kabupaten Kolaka Utara, pembangunan Gedung Kantor Inspektorat diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan menunjang produktivitas aparatur. Sebelum adanya gedung baru, aktivitas pengawasan menghadapi keterbatasan ruang kerja dan fasilitas pendukung yang berpotensi memengaruhi efektivitas audit dan pembinaan perangkat daerah. Meskipun demikian, keberadaan gedung baru tidak secara otomatis menjamin peningkatan kinerja tanpa pemanfaatan fasilitas yang optimal dan pengelolaan organisasi yang efektif (Prabowo & Supardal, 2024).

Berdasarkan *roadmap* penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada faktor SDM dan sistem pengendalian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis efektivitas pembangunan gedung pengawasan melalui pendekatan berbasis dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah. Penelitian ini secara operasional bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara berkaitan dengan peningkatan kinerja APIP, ditinjau dari aspek pemanfaatan fasilitas, dukungan terhadap kegiatan pengawasan, produktivitas kerja, serta capaian indikator kinerja yang terdokumentasi. Hasil penelitian diharapkan memberikan dasar evaluatif bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan fasilitas perkantoran yang lebih berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai efektivitas pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara terhadap peningkatan kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena berdasarkan data yang bersifat dokumentatif tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2019). Objek penelitian ini adalah pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara beserta dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah, dengan

fokus pada kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja aparatur pengawas.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah periode pembangunan gedung pada tahun 2024. Dokumen yang dianalisis meliputi dokumen perencanaan (RKPD, RKA-SKPD, DPA), dokumen pelaksanaan kegiatan, serta dokumen evaluasi dan laporan kinerja seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan hasil evaluasi pembangunan yang relevan. Dokumen tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) dokumen perencanaan anggaran dan program, (2) dokumen pelaksanaan pembangunan fisik, dan (3) dokumen capaian kinerja pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh literatur pendukung seperti peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas pembangunan infrastruktur pemerintahan.

Indikator efektivitas dalam penelitian ini diturunkan dari kesesuaian antara tujuan pembangunan gedung yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen evaluasi dan LKjIP. Indikator tersebut mencakup keterpenuhan sarana dan prasarana kerja, optimalisasi tata ruang pengawasan, ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan, serta intensitas koordinasi internal sebagaimana tercantum dalam laporan kinerja. Dengan demikian, efektivitas tidak diukur secara persepsional, melainkan berdasarkan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan realisasi capaian kinerja yang terdokumentasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri arsip dan laporan resmi instansi terkait. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan pembangunan gedung dan indikator kinerja pengawasan. Pada tahap penyajian data (data display), informasi yang telah direduksi disusun dalam bentuk matriks perbandingan antara tujuan pembangunan dan capaian kinerja. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, dilakukan interpretasi atas keterkaitan antara pembangunan fisik gedung dan perubahan capaian indikator kinerja berdasarkan konsistensi temuan dalam dokumen.

Proses penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi masalah, penelusuran literatur dan dokumen, pengumpulan serta klasifikasi data berdasarkan kategori dokumen, analisis kualitatif deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur perkantoran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawasan internal. Pembangunan ini didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara efektif dan efisien. Sebelumnya, keterbatasan ruang kerja, kondisi bangunan lama yang kurang representatif, serta minimnya fasilitas pendukung menyebabkan aktivitas pengawasan sering kali tidak berjalan optimal. Dengan adanya gedung baru, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi pelaksanaan audit, revidu, dan pembinaan terhadap perangkat daerah.

Berdasarkan dokumen RKPD dan RKA-SKPD Kabupaten Kolaka Utara tahun 2024, disebutkan bahwa salah satu permasalahan utama kelembagaan Inspektorat adalah keterbatasan ruang kerja dan belum tersedianya ruang arsip yang memenuhi standar penyimpanan dokumen pengawasan. Dalam dokumen tersebut juga ditegaskan bahwa pembangunan gedung baru bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarbidang serta mempercepat penyelesaian laporan hasil pengawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan gedung telah direncanakan secara sistematis dan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dalam dokumen perencanaan daerah.

Peta lokasi pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan posisi strategis yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan fungsi pengawasan. Lokasi kegiatan pembangunan ini ditempatkan di area yang mudah diakses oleh perangkat

daerah maupun masyarakat, sehingga memperlancar proses koordinasi, konsultasi, dan pelayanan publik. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan aspek tata ruang wilayah, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kemudahan konektivitas dengan pusat pemerintahan daerah. Dengan demikian, keberadaan gedung ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik kelembagaan, tetapi juga memperkuat peran Inspektorat sebagai institusi yang dekat dan responsif terhadap berbagai kebutuhan pengawasan di Kabupaten Kolaka Utara. Adapun peta lokasi kegiatan pembangunan Gedung Inspektorat dapat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan

Selain mempertimbangkan aspek aksesibilitas, lokasi pembangunan gedung ini juga dirancang agar selaras dengan perencanaan tata kota yang berkelanjutan. Penempatan lahan yang cukup luas memungkinkan adanya ruang terbuka hijau di sekitar bangunan yang berfungsi tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai ruang resapan air dan penyeimbang lingkungan. Dengan demikian, pembangunan gedung ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelembagaan, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ramah lingkungan, dan berwawasan ekologis. Penataan area parkir yang memadai serta jalur sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki juga memperlihatkan perhatian terhadap kelancaran mobilitas pengguna gedung.

Lebih lanjut, pemilihan lokasi ini juga memperhitungkan faktor keamanan dan kenyamanan kerja bagi seluruh aparatur. Kedekatannya dengan pusat pemerintahan daerah memberikan keuntungan strategis dalam hal koordinasi antarinstansi, sekaligus meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional. Penempatan yang berada di area dengan infrastruktur dasar memadai, seperti akses jalan utama, jaringan listrik, dan sarana komunikasi, menjadikan gedung ini mampu mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari Inspektorat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menitikberatkan pada kualitas fisik bangunan, tetapi juga pada aspek fungsionalitas lokasi yang secara langsung berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal di Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian untuk rancangan gedung inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dapat ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2 merupakan visualisasi rancangan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara yang direncanakan sebagai pusat aktivitas pengawasan internal pemerintah daerah. Tampilan gedung dua lantai dengan desain modern ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas kerja yang representatif dan sesuai standar kelembagaan. Desain arsitektur dengan kombinasi kaca, garis tegas, serta aksen warna yang dinamis memberikan kesan profesional dan transparan, sejalan dengan nilai-nilai akuntabilitas yang diemban oleh Inspektorat. Area depan gedung yang luas serta aksesibilitas

yang baik juga menunjukkan perhatian terhadap kenyamanan pegawai maupun tamu yang datang untuk keperluan koordinasi atau pelayanan. Dengan rancangan ini, gedung diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga menjadi simbol penguatan kapasitas institusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berintegritas.



Gambar 2. Rancangan Gedung Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara

Berdasarkan aspek perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan gedung ini telah memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas pembangunan infrastruktur pemerintahan. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan kapasitas ruang yang tersedia, penataan fungsi antarbagian yang mendukung koordinasi kerja, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang arsip, ruang rapat, dan area pelayanan publik yang menunjang kegiatan pengawasan. Selain itu, desain ruang dan fasilitas yang disediakan mencerminkan perhatian terhadap kenyamanan, keamanan, serta produktivitas pegawai, di mana tata letak yang fungsional mempermudah komunikasi dan mempercepat proses koordinasi antarunit kerja.

Berdasarkan sisi pemanfaatan, keberadaan gedung baru memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pengawas internal. Lingkungan kerja yang lebih tertata dan sarana yang lebih lengkap mendorong aparatur untuk bekerja dengan lebih fokus, teratur, dan efisien. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan dan efektivitas kegiatan pembinaan terhadap perangkat daerah. Fasilitas yang mendukung kegiatan administrasi dan koordinasi antarbidang memungkinkan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap permasalahan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan telaah dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), terdapat perbaikan pada indikator ketepatan waktu penyelesaian laporan hasil pengawasan serta peningkatan intensitas koordinasi internal setelah gedung baru difungsikan. Meskipun tidak seluruh indikator mengalami perubahan signifikan, dokumen menunjukkan adanya tren perbaikan dalam aspek administrasi pengawasan dan manajemen arsip. Hal ini memberikan dasar argumentatif bahwa peningkatan kinerja tidak hanya diasumsikan secara logis, tetapi tercermin dalam indikator kinerja yang terdokumentasi.

Selain itu, dari perspektif kelembagaan, pembangunan gedung kantor Inspektorat ini memperkuat posisi strategis lembaga pengawas dalam struktur pemerintahan daerah. Gedung yang representatif memberikan legitimasi simbolik bahwa pengawasan bukan hanya fungsi pendukung, melainkan merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kehadiran sarana yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan wibawa institusi, sehingga mendorong perangkat daerah untuk lebih patuh terhadap aturan dan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahma et al., 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas sarana fisik berkontribusi terhadap penguatan kapasitas organisasi publik. Namun, berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih menekankan aspek persepsional, penelitian ini mendasarkan analisis pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah, sehingga memberikan pendekatan evaluatif yang lebih berbasis bukti administratif.

Dari sisi efisiensi pelayanan, gedung baru ini juga berkontribusi pada pemangkasan hambatan birokrasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Proses koordinasi dan komunikasi antarbagian dapat dilakukan secara lebih cepat karena tersedianya ruang kerja yang terintegrasi dengan teknologi pendukung. Hal ini memungkinkan Inspektorat untuk merespons aduan masyarakat maupun permintaan klarifikasi dari perangkat daerah dengan lebih tepat waktu, sehingga efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan semakin meningkat.

Lebih jauh lagi, keberadaan gedung kantor yang modern dan layak pakai menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi aparatur pengawas internal untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas. Dengan fasilitas yang mendukung pengembangan kapasitas, aparatur dapat menjalankan tugasnya secara lebih sistematis dan akurat, serta mampu mengurangi potensi kesalahan administratif. Dengan demikian, pembangunan gedung kantor ini bukan sekadar proyek fisik semata, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam memperkuat kualitas pengawasan internal, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Meskipun menunjukkan berbagai dampak positif, hasil analisis juga mengindikasikan bahwa optimalisasi pemanfaatan gedung masih memerlukan penguatan manajemen internal dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal. Dokumen evaluasi internal menunjukkan bahwa peningkatan kualitas fisik bangunan belum sepenuhnya diikuti dengan standarisasi prosedur kerja dan sistem digitalisasi arsip secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik perlu diintegrasikan dengan reformasi manajerial agar dampaknya terhadap kinerja lebih signifikan dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara dapat dinilai relatif efektif berdasarkan kesesuaian antara tujuan dalam dokumen perencanaan dengan capaian indikator kinerja yang terdokumentasi. Namun demikian, efektivitas tersebut bersifat kontekstual dan masih bergantung pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas, penguatan manajemen internal, serta integrasi teknologi informasi dalam sistem pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik bangunan, tetapi juga oleh konsistensi pemanfaatannya dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara secara substansial selaras dengan tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan pengawasan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan dan laporan kinerja daerah. Efektivitas pembangunan tercermin dari keterpenuhan sarana kerja, perbaikan tata ruang pengawasan, serta adanya indikasi peningkatan ketepatan waktu penyelesaian laporan dan koordinasi internal yang terdokumentasi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur fisik dapat dipahami sebagai faktor pendukung kinerja APIP, meskipun bukan satu-satunya determinan peningkatan kinerja organisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder berbasis dokumen tanpa dilengkapi wawancara langsung atau observasi lapangan, sehingga analisis bergantung pada konsistensi dan kelengkapan laporan administratif yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan analisis dokumen dengan pendekatan empiris melalui wawancara atau survei untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Secara kebijakan, pemerintah daerah perlu memastikan optimalisasi pemanfaatan gedung melalui penguatan manajemen internal, digitalisasi sistem arsip dan pengawasan, serta penetapan indikator kinerja yang terukur untuk mengevaluasi dampak infrastruktur terhadap kualitas pengawasan secara

berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, pembangunan fasilitas perkantoran tidak berhenti pada aspek fisik, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, S., Todingbua, M. A., & Patiung, N. (2024). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. *Indonesian Journal of Economy Studies*, 3(2), 29–38.
- Dewi, H. A. (2022). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Guna Pelaksanaan Good Governance Berbasis CACM Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Arena Hukum*, 15(2), 399–422.
- Ekowati, M., & Akbar, F. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Media Birokrasi*, 59–78.
- Fujilestari, N. A., Rochaeni, A., & Ramdani, W. (2025). Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas dan Integritas Pada Era Transparansi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 314–324.
- Gazali, M. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 168–180.
- Gumilang, I., Prihana, E., & Syarkani, Y. (2025). Pengaruh Perencanaan, Pengawasan dan Fasilitas Kerja Terhadap Kualitas Pekerjaan Pembangunan Gedung-Gedung Pemerintah yang Dilaksanakan Oleh Penyedia Jasa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cianjur. *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 1–12.
- Jauhari, Y. H., & Sukmara, A. R. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Terhadap Pelaksanaan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Ciamis. *Journal of Management and Social Sciences*, 3(4), 112–130.
- Lii, R. A., Wokas, H. R., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis Kewenangan dan Bentuk Pengawasan Inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 439–446.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Prabowo, I. D., & Supardal, S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(4), 731–745.
- Ragi, F., Nugraha, A. R., Maharani, A. P., Affandi, N. K., & Darmawan, I. (2024). Sinergi Pembinaan dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 274–283.
- Rahma, A. F., Wirjatmi, E., & Jubaedah, E. (2023). Strategi Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, 4(1), 38–63.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.

Halaman ini dikosongkan